



LAWYERS



WILLS

**ELECTRONIC SIGNING AND
REMOTE WITNESSING**

www.integritylawfirms.com

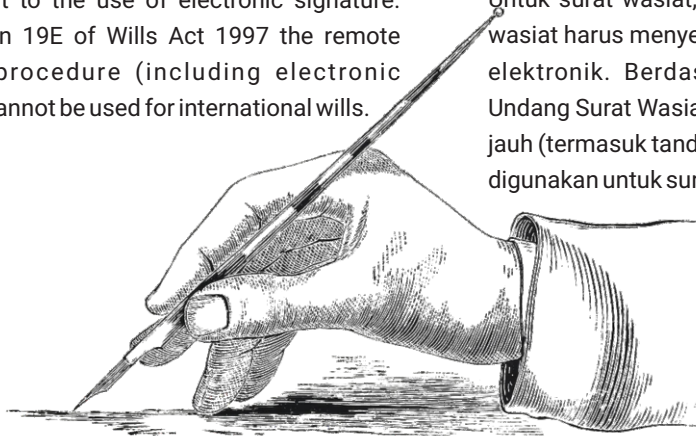
Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

The Victorian Government allowed for wills to be signed and witnessed remotely through the amendments within Electronic Transactions (Victoria) Act 2000 and Wills Act 1997.

Electronic Signature

Legal documents are usually signed with a pen, also known as the wet ink signature. The Victorian Government considered the use of electronic signatures (or e-signature) during the pandemic and made the amendment permanent to enable organisations and individuals to sign documents remotely from a mobile device or computer.

Electronic signature is legally binding. Not all legal documents can be signed with electronic signature. For wills, note that the elements of a will must consent to the use of electronic signature. Under Section 19E of Wills Act 1997 the remote execution procedure (including electronic signatures) cannot be used for international wills.



There are several ways to electronically sign a document, some of which are (but not limited to):

- Paste a copy of a signature into a document
- Sign a PDF on a tablet, smartphone or laptop using a stylus or finger
- Physically sign a hardcopy document and scan the document
- Confirm your agreement by electronically selecting an option indicating agreement

Remote Witnessing

Like e-signatures, a person may witness the signing of a will remotely. This is known to be a "remote execution procedure" (Section 8A Wills Act 1997)

Pemerintah Victoria mengizinkan surat wasiat untuk ditandatangani dan disaksikan secara jarak jauh berdasarkan amandemen dalam Electronic Transactions (Victoria) Act 2000 dan Wills Act 1997.

Tanda Tangan Elektronik

Dokumen hukum biasanya ditandatangani dengan pulpen, juga dikenal sebagai tanda tangan basah. Pemerintah Victoria mempertimbangkan penggunaan tanda tangan elektronik selama pandemi dan membuat amandemen tersebut permanen untuk memungkinkan organisasi dan individu menandatangani dokumen dari jarak jauh melalui perangkat seluler atau komputer.

Tanda tangan elektronik mengikat secara hukum. Tidak semua dokumen dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Untuk surat wasiat, perhatikan bahwa unsur surat wasiat harus menyetujui penggunaan tanda tangan elektronik. Berdasarkan Bagian 19E Undang-Undang Surat Wasiat 1997, prosedur eksekusi jarak jauh (termasuk tanda tangan elektronik) tidak dapat digunakan untuk surat wasiat internasional.

Ada beberapa cara untuk menandatangani dokumen secara elektronik, diantaranya (namun tidak terbatas pada):

- Tempel salinan tanda tangan ke dokumen
- Menandatangani PDF dengan tablet, smartphone, atau laptop menggunakan stylus atau jari
- Menandatangani dokumen hardcopy secara fisik dan memindai dokumen tersebut
- Mengkonfirmasi persetujuan Anda dengan memilih opsi yang menunjukkan persetujuan secara elektronik

Penyaksian Secara Jarak Jauh

Seperti tanda tangan elektronik, seseorang dapat menyaksikan penandatanganan surat wasiat dari jarak jauh. Ini dikenal sebagai "prosedur eksekusi jarak jauh" (Bagian 8A Wills Act 1997)

Most documents are allowed to be witnessed online. Though for certain legal documents such as wills, there are special requirements that applies. Anybody who are going to witness a document should pay attention to:

- a. Identification– as a witness, you should be able to clearly identify the participants when they are signing the document (either using e-signature or wet ink signature).
- b. Consent - the counterparty must consent to the methods used and that the testator is willing to sign the will.
- c. Reliability - using a reliable method to sign the document.

To ensure that the proceedings are valid:

- It must be ensured how the participants will be witnessing the testator sign the will; whether through Zoom or Skype, how the will is sent to the other participants to be signed, and access to items that will facilitate remote execution procedure (such as a scanner or a printer).
- All the elements of the remote execution procedure must also happen in the same day.
- Witnesses are able to clearly see the testator signing the will and identify the signatory.
- Witnesses must be certain that the will they sign is the same document signed by the testator. Any witnesses present with the testator should also sign the will before sending it to other witnesses who are present via audio visual link.
- Witnesses sign a statement in the will that the requirements have been met.

Sebagian besar dokumen bisa disaksikan secara online. Tetapi untuk beberapa dokumen seperti wasiat, ada syarat-syarat khusus yang berlaku. Siapapun yang akan menjadi saksi sebaiknya memperhatikan:

- a. Sebagai saksi, saksi bisa dengan jelas mengidentifikasi para partisipan saat tanda tangan (baik dengan tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah).
- b. Saksi harus menyetujui metode yang digunakan dan pembuat wasiat tanpa paksaan apa pun menandatangani surat wasiat.
- c. Menggunakan metode yang dapat diandalkan untuk menandatangani dokumen.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaannya valid:

- Harus dipastikan bagaimana peserta akan menyaksikan pembuat wasiat menandatangani surat wasiat; apakah melalui Zoom atau Skype, bagaimana itu dikirim ke peserta lain untuk ditandatangani, dan akses ke item yang akan memfasilitasi prosedur eksekusi jarak jauh (seperti pemindai atau printer).
- Semua elemen dari prosedur eksekusi jarak jauh harus dilakukan pada hari yang sama.
- Saksi dapat dengan jelas melihat pembuat wasiat menandatangani surat wasiat dan mengidentifikasi penanda tangan.
- Saksi harus yakin bahwa surat wasiat yang mereka tandatangi adalah dokumen yang sama yang ditandatangani oleh pembuat wasiat. Setiap saksi yang hadir bersama pembuat wasiat juga harus menandatangani surat wasiat sebelum mengirimkannya ke saksi lain yang hadir melalui tautan audio visual.
- Saksi menandatangani surat wasiat bahwa persyaratan telah dipenuhi.

Important note

"All elements of the remote execution procedure must be carried out on the same day and within Victoria." (Number 3 of 8A Wills Act 1997)

While most documents are allowed to be witnessed remotely outside Victoria, it is not the case for Wills. Every participant may witness the signing of the will remotely, but they must be physically located in Victoria.

For remote execution procedure, one of the witness and only one is needed to be a "special witness" (either an Australian legal practitioner, a justice of the peace, or a person who is a member of a prescribed class of person). The special witness must sign the will as the special witness last, whether the special witness is physically present with the testator or not. The special witness must check the will for compliance with the remote execution procedure and ensure that there is a statement on the will:

1. The will was signed and witnessed in accordance with the remote execution procedure.
2. The person is a special witness and what type of special witness the person is.
3. Whether an audio-visual recording was made of the signing or witnessing of the will by the remote execution procedure.

It is best to record the proceedings of the remote execution procedure.

Catatan penting

"Semua elemen dari prosedur eksekusi jarak jauh harus dilakukan pada hari yang sama dan di dalam wilayah Victoria." (Nomor 3 dari 8A Wills Act 1997)

Sebagian besar dokumen diizinkan untuk disaksikan secara jarak jauh di luar Victoria, tetapi tidak demikian halnya dengan Wills. Setiap peserta dapat menyaksikan penandatanganan surat wasiat secara jarak jauh, tetapi mereka secara fisik harus berada di Victoria.

Untuk prosedur eksekusi jarak jauh, salah satu saksi dan hanya satu yang diperlukan untuk menjadi "saksi khusus" (baik seorang praktisi hukum Australia, seorang hakim perdamaian, atau orang yang merupakan anggota dari golongan orang tertentu). Saksi khusus harus menandatangani surat wasiat sebagai saksi khusus terakhir, baik saksi khusus itu secara fisik hadir bersama pewaris atau tidak. Saksi khusus harus memeriksa surat wasiat untuk kepatuhan dengan prosedur eksekusi jarak jauh dan memastikan bahwa ada pernyataan tentang surat wasiat tersebut:

1. Surat wasiat ditandatangani dan disaksikan sesuai dengan prosedur eksekusi jarak jauh
2. Orang tersebut adalah saksi khusus dan jenis saksi khusus
3. Ada atau tidaknya rekaman atas audio visual dari penandatanganan atau kesaksian surat wasiat dengan prosedur eksekusi jarak jauh

Sebaiknya pelaksanaan dari prosedur eksekusi secara jarak jauh direkam.



About Integrity

Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, as stated, intends to provide professional service within the best capacity and transparency, and anti-judicial mafia practice. This law firm was founded by Denny Indrayana, a Professor of Constitutional Law, Deputy Minister of Justice and Human Rights (2011-2014), who is a registered legal practitioner in 2 (two) countries, Indonesia and Australia. INTEGRITY has a vision to become a law firm that significantly contributes to equal law enforcement and with integrity in Indonesia. INTEGRITY has opened and extended its practice to its branch office in Melbourne, Australia. INTEGRITY is led by experienced and reliable lawyers in its field of legal practice.

Tentang Integrity

Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, sesuai dengan namanya, dimaksudkan untuk memberikan layanan profesional dengan kapasitas terbaik dan integritas tak terbeli, menolak tegas praktik mafia hukum. Didirikan oleh Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011 – 2014) serta teregister sebagai Advokat di 2 (dua) negara, Indonesia dan Australia. INTEGRITY memiliki visi untuk menjadi firma yang mampu berkontribusi bagi penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia. Selain memberikan layanan jasa hukum di Indonesia, INTEGRITY juga telah berpraktik dan membuka kantor di Melbourne, Australia. INTEGRITY diawaki oleh para lawyers berpengalaman dan handal di bidangnya.



PRACTICE AREAS

**Business Competition Disputes | Corporate Law | Investment Law |
Capital Market Law | Business Licensing | Tax Law | Banking Law |
Asset Recovery | Bankruptcy Law | Labour Law | Immigration Law |
Land Disputes | Civil Law | Criminal Law | General Election Disputes |
State Administrative Claims | Constitutional Law Disputes |
Constitutional Review at the Constitutional Court | Judicial Review at the
Supreme Court | Good Governance | Good Corporate Governance |
Drafting of Public & Corporate Regulations | Natural Resources Disputes |
Intellectual Property Rights | Environmental Law | Family Law**

AREA PRAKTIS

**Sengketa Persaingan Usaha | Hukum Perusahaan | Hukum Investasi |
Hukum Pasar Modal | Perizinan Usaha | Hukum Pajak | Hukum Perbankan |
Pemulihan Aset | Hukum Kepailitan | Hukum Ketenagakerjaan | Hukum Keimigrasian |
Sengketa Tanah | Hukum Perdata | Hukum Pidana | Sengketa Pemilihan Umum |
Tuntutan Administrasi Negara | Sengketa Hukum Tata Negara |
Tinjauan Konstitusi di Mahkamah Konstitusi | Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung |
AUPB | Tata Kelola Perusahaan Yang Baik |
Drafting Peraturan Perusahaan Privat dan Publik | Sengketa SDA |
Hak Kekayaan Intelektual | Hukum Lingkungan | Hukum Kekeluargaan**

PROGRAMS

INTEGRITY offers many legal services such as litigation services, consultation, and legal research. There are other services that INTEGRITY provides such as programs dedicated to the reconstruction of the justice system:

1. **INTEGRITY Constitutional Advocacy** is legal assistance inside or outside the court (litigation and non-litigation), including arbitration and alternative dispute resolution.
2. **INTEGRITY Constitutional Discussion** is regular discussions that discusses actual legal issues and acquiring the solution to those issues.
3. **INTEGRITY Client Alert** provides research conducted by INTEGRITY to announce updates on the changes to legislation for the awareness of the public and legal entities, both private and public.
4. **INTEGRITY Legal Training** is qualified legal training and upgrading, encompassing relevant subjects in the field such as leadership, anti-corruption, legal drafting, and other legal skills.
5. **INTEGRITY Legal Update** is real legal issues studies, either written down as short articles or other types of product.
6. **INTEGRITY Scholarship** is a scholarship offered annually that is contested through an academic legal writing competition where the finalists will be invited to present and debate their topic against the opposing finalist.

INTEGRITY memiliki berbagai layanan hukum seperti litigasi, konsultasi dan riset hukum. Adapun layanan yang disediakan INTEGRITY seperti program-program yang didedikasikan kepada perbaikan sistem hukum, berupa:

1. **INTEGRITY Constitutional Advocacy** adalah litigasi yang diinisiasi oleh INTEGRITY terkait isu publik, termasuk pengujian peraturan perundangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.
2. **INTEGRITY Constitutional Discussion** adalah diskusi rutin yang membahas isu-isu hukum aktual, dan mencari solusi.
3. **INTEGRITY Client Alert** adalah riset yang dilakukan oleh INTEGRITY untuk menyampaikan update perubahan regulasi agar diketahui baik oleh masyarakat maupun badan hukum publik/privat.
4. **INTEGRITY Legal Training** adalah pendidikan dan pelatihan keahlian hukum praktis seperti legal audit, legal writing, anti-corruption training, legal drafting, dan pelatihan hukum lainnya.
5. **INTEGRITY Legal Update** adalah kajian tentang isu hukum aktual, baik dalam bentuk artikel singkat maupun bentuk lainnya.
6. **INTEGRITY Scholarship** adalah beasiswa tahunan yang diperebutkan melalui lomba karya tulis ilmiah yang finalisnya diundang untuk mempresentasikan dan memperdebatkan topiknya melawan finalis lainnya.



LAWYERS

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 📍 Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA** Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+62 21 2555 8836 P +61 3 85184708

 integrity@integritylawfirms.com  www.integritylawfirms.com